



Analisis *Flypaper effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Alya Astrie Yonanda^{1*}, Candra Mustika², Parmadi³

¹⁻³ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: yonandaalyaastrie@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Tax Revenue Sharing Fund (DBHP) on Regional Expenditure, as well as to analyze whether the flypaper effect phenomenon occurs in Regencies/Cities in Jambi Province during the 2017-2023 period. The data used in this study is panel data that combines time series data for 7 years and cross-section data from 11 Regencies/Cities in Jambi Province. The analysis method used is panel data regression with the selected model Fixed Effect Model (FEM). The results of the study show that simultaneously (F Test), the variables PAD, DAU, DAK, and DBHP have a significant effect on Regional Expenditure. Partially (t Test), PAD and DBHP do not have a positive and significant effect on Regional Expenditure, while DAU and DAK show a positive and significant effect on Regional Expenditure. This study also found a flypaper effect in regencies/cities in Jambi Province. This indicates that regional governments in Jambi Province tend to be more responsive in increasing regional spending using transfer funds from the central government rather than optimizing their own potential Regional Original Revenue (PAD).*

Keywords: *Flypaper Effect; General Allocation Fund; Local Expenditure; Panel Data Regression; Regional Original Revenue.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terhadap Belanja Daerah, serta untuk menganalisis apakah terjadi fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2017-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang menggabungkan data deret waktu (*time series*) selama 7 tahun dan data deret lintang (*cross-section*) dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (Uji F), variabel PAD, DAU, DAK, dan DBHP berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial (Uji t), PAD dan DBHP tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara DAU dan DAK menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian ini juga didapat hasil bahwa terjadinya fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi cenderung lebih responsif dalam meningkatkan belanja daerah menggunakan dana transfer dari Pemerintah Pusat dibandingkan dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

Kata Kunci: Belanja Daerah; Dana Transfer; *Flypaper Effect*; Pendapatan Asli Daerah; Regresi Data Panel.

1. LATAR BELAKANG

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut berdampak pada beralihnya kontrol pemerintahan di daerah diiringi dengan berlakunya desentralisasi fiskal. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan daerah dapat berdiri di kaki sendiri dan mengurangi ketergantungannya pada Pemerintah Pusat, dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang dihasilkan.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan desentralisasi fiskal adalah meningkatnya kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataannya, sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP).

Salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Jambi, Menurut (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024), daerah ini dari pelaksanaan pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau, dikarenakan masih banyak kebutuhan pembangunan yang terus meningkat serta fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi pendapatan asli daerah itu sendiri sehingga dalam hal ini masih banyak bergantung pada dana transfer dari pusat ke daerah, sehingga dicurigai terjadi fenomena flypaper effect. *Flypaper effect* adalah suatu kondisi yang menunjukkan perilaku pemerintah dimana lebih besar merespon transfer/grants dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh daerahnya sendiri (PAD) dalam membiayai belanja daerah. *Flypaper effect* dapat menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pusat yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah, terutama ketika Pendapatan Asli Daerah relatif rendah. Potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan menjadi kurang maksimal, serta menimbulkan risiko pemborosan anggaran karena belanja daerah lebih banyak dialokasikan dari dana perimbangan dibandingkan PAD (Z. M. Putri, 2020).

Jika diamati secara keseluruhan jumlah realisasi DAU, DAK, dan DBHP Kab/Kota di Provinsi Jambi, memperlihatkan dana tersebut mempunyai peran yang sangat penting pada keuangan daerah dalam belanja daerah khususnya DAU dan DAK. Belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih hampir sepenuhnya ditompang oleh dana dana tersebut atau bisa dibilang dana perimbangan yang berasal dari pusat. Apabila situasi seperti ini terus berjalan, maka akan menghambat proses peningkatan suatu kemandirian daerah. Ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana transfer dari pada PAD sehingga berdampak belanja daerah yang tidak tepat sasaran, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya fenomena flypaper effect, yang dimana fenomena ini merupakan bahasan utama dalam penelitian ini.

Berbagai penelitian telah dilakukan berdasarkan pada data dan fakta nyata untuk menunjukkan fenomena *flypaper effect* terhadap belanja daerah yang terjadi di pemerintah

daerah, seperti yang dilakukan oleh , hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya *flypaper effect* di Indonesia. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Kesarditama, 2024), Penelitian ini menemukan bahwa secara terpisah, DAU, DBH, DAK, dan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi antara tahun 2017 dan 2022. Secara bersama-sama DAU, DBH, DAK dan PAD juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari (Sembel, dkk, 2018), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada Fenomena *Flypaper effect* yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara antara tahun 2005 hingga 2016.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan bagaimana pengaruh PAD dan Dana Perimbangan seperti DAU, DAK, dan DBHP terhadap belanja daerah serta apakah ditemui fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini penting dilakukan agar kita dapat memahami dampak yang muncul ketika pengaruh dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah itu sendiri terhadap Belanja Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2017-2023, variabel yang digunakan tidak hanya pendapatan asli daerah saja tetapi akan berorientasi dengan lebih luas lagi yakni dengan Dana Perimbangan yang termasuk didalamnya adalah DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil pajak (DBHP) sebagai sumber penerimaan daerah, dan juga berdasarkan data ditemui bahwa provinsi jambi menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Desentralisasi Fiskal

Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan pemerataan keuangan antar daerah, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, pemerataan bertujuan mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyaluran dana dari pusat ke daerah. Secara horizontal, pemerataan bertujuan mengurangi perbedaan kemampuan keuangan antar daerah karena adanya perbedaan potensi pendapatan dan kebutuhan. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, digunakan sistem transfer dana dari pusat ke daerah, yang terdiri dari transfer umum untuk menutup kekurangan anggaran dan transfer khusus untuk membiayai program tertentu (Puspita., 2021)

Namun, implementasi desentralisasi fiskal tidak lepas dari berbagai tantangan teoritis dan praktis. Tantangan tersebut antara lain risiko ketergantungan fiskal yang berlebihan dari daerah pada transfer pusat, penugasan pengeluaran yang tidak sesuai juga dapat menimbulkan

masalah seperti pengeluaran untuk pengangguran dan asuransi sosial, hal ini menjadi wewenang pemerintah daerah, potensi korupsi akibat lemahnya kapasitas dan akuntabilitas daerah, serta kesulitan dalam merancang formula transfer yang adil dan tepat sasaran. Selain itu, dalam konteks negara dengan keragaman geografis dan ekonomi seperti Indonesia, teori desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) juga mendapat perhatian, di mana daerah dengan kekhususan atau keistimewaan tertentu menerima perlakuan fiskal yang berbeda untuk mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas sosial-politik (Ambya, 2023).

Fenomena *Flypaper Effect*

Istilah *flypaper effect* pertama kali muncul pada tahun 1979. Istilah ini diperkenalkan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld sebagai upaya untuk menjelaskan gagasan yang disampaikan oleh Arthur Okun seorang ekonom Amerika yang dikenal dalam bidang kebijakan publik dan perilaku fiskal pemerintah, yang menyatakan bahwa *Flypaper effect* merujuk pada situasi di mana pemerintah daerah merespons pengeluaran mereka dengan lebih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, daripada mengoptimalkan PAD mereka sendiri. Dengan demikian, *flypaper effect* menunjukkan bahwa bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah pusat cenderung lebih menstimulus belanja daerah daripada meningkatkan PAD.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai seluruh hak yang dimiliki daerah sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah ini memegang peran penting karena dari sinilah pemerintah daerah dapat membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Besar kecilnya PAD sering kali menjadi pengukur sejauh mana suatu daerah mampu berdiri sendirindala mengelola urusan pemerintahannya. Adapun Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, retribusi perizinan tertentu, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah jenis dana transfer dari pemerintah pusat yang penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, tanpa ketentuan khusus dalam penggunaannya sehingga daerah memiliki kebebasan penuh dalam mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, penetapan alokasi DAU secara nasional ditentukan paling sedikit

sebesar 25% dari pendapatan dalam negeri neto yang diterima. Pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, porsi untuk DAU nasional meningkat menjadi setidaknya 26% dari PDN neto (Puspita dkk., 2021).

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus atau DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang penggunaannya disertai syarat dan ketentuan khusus, sehingga dalam hal ini, dana ini hanya boleh digunakan untuk kegiatan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya, Dana alokasi khusus ini terdiri dari dua jenis yaitu DAK fisik dan Non fisik. DAK Fisik, merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk tujuan program tertentu. Adapun contoh program ini meliputi pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, perbaikan jalan dan irigasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, dukungan infrastruktur pertanian dan permukiman, serta program-program lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan prioritas nasional. DAK non fisik adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk kebutuhan atau program yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, tanpa kewajiban pemerintah daerah menyediakan dana pendamping. Skema ini mulai digunakan resmi sejak tahun 2016, dikarenakan perubahan struktur dana transfer dalam APBN.

Dana bagi Hasil Pajak

Menurut (Keuangan, 2021) Dana bagi hasil pajak berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21. Untuk PBB, 90% dialokasikan ke daerah (16,2% provinsi, 64,8% kabupaten/kota, dan 9% biaya pemungutan) serta 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kembali ke kabupaten/kota dengan skema 65% merata dan 35% sebagai insentif kinerja. BPHTB dibagi 16% untuk provinsi, 64% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 20% untuk pusat yang dibagikan merata. Sementara itu, dana bagi hasil PPh sebesar 20% untuk daerah, dengan pembagian 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

Belanja Daerah

Menurut (Renata, 2024) Belanja daerah digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, transportasi, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat setempat memiliki akses yang memadai terhadap layanan-layanan ini. Selain itu Mayoritas belanja daerah juga dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur serta proyek-proyek investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Ini bisa termasuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas air dan sanitasi, serta proyek-proyek pembangunan lainnya. Sebagian besar belanja daerah juga digunakan untuk membayar gaji dan honorarium seperti pegawai negeri sipil (PNS) serta pekerja. Ini termasuk gaji tenaga pendidik, petugas kesehatan, petugas 38 keamanan, dan pegawai lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik. Pemerintah daerah sering juga mengalokasikan dana untuk subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti program bantuan makanan, bantuan pendidikan, program kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Dan bagian dari belanja daerah juga digunakan untuk biaya operasional dan administrasi pemerintah daerah itu sendiri, termasuk biaya untuk fasilitas kantor, pengadaan barang dan jasa, serta biaya administrasi lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu kombinasi antara data time series dan data *cross-section*. Dalam penelitian ini, data *cross-section* diperoleh dari 9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Jambi, sedangkan data time series mencakup periode waktu selama sebelas tahun, yaitu dari tahun 2017 hingga 2023. Data yang digunakan meliputi variabel Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, dan DBHP. Sumber data berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses secara daring melalui situs resmi. Data ini bersifat sekunder karena diperoleh dari instansi pemerintah yang telah mengumpulkan dan mempublikasikannya secara sistematis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2017–2023. Data tersebut terdiri atas data Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Metode Analisis Data

Analisis data ini menggunakan analisis regresi data panel. Model regresi data panel ini adalah model analisis yang menggunakan data panel yaitu gabungan antara dua deret waktu atau time-series dan data deret lintang atau cross section (Basuki, 2021). Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), yang akan dianalisis dalam persamaan model regresi. Sedangkan Belanja Daerah berperan sebagai variabel dependen.

Untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, persamaan model regresi data panel yang terbentuk dalam penelitian ini yang sebagai berikut :

$$\text{LogBD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogPAD}_{it} + \beta_2 \text{logDAU}_{it} + \beta_3 \text{LogDAK}_{it} + \beta_4 \text{LogDBHP}_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (i)$$

Dalam penelitian ini, BD merupakan Belanja Daerah, PAD merupakan Pendapatan Asli Daerah, DAU merupakan Dana Alokasi Umum, DAK merupakan Dana Alokasi Khusus, dan DBHP merupakan Dana Bagi Hasil Pajak. Selanjutnya, i menunjukkan jumlah *cross section*, yaitu 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, t menunjukkan periode waktu (*time series*) selama 7 tahun (2017–2023), dan α merupakan konstanta dalam model penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengetahui apakah terjadi fenomena *flypaper effect* pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, digunakan model regresi data panel yang sama dengan rumusan masalah pertama. Analisis dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi PAD dengan koefisien dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBHP). Fenomena *flypaper effect* dinyatakan terjadi apabila salah satu atau seluruh koefisien dana perimbangan lebih besar daripada koefisien PAD dan signifikan. Sebaliknya, apabila koefisien PAD sama dengan atau lebih besar daripada koefisien dana perimbangan, maka *flypaper effect* dinyatakan tidak terjadi.

Menurut (Basuki, 2021), analisis data panel pada penelitian ini dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu Common Effect, Fixed effect, dan Random Effect. Untuk menentukan pemilihan model yang paling sesuai dapat dilakukan dengan bantuan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrange.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat menjadi masalah serius dalam analisis regresi karena dapat menyebabkan interpretasi yang tidak akurat terhadap pengaruh masing-masing variabel independen. Ketika dua atau lebih variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain, maka koefisien regresi menjadi tidak stabil, standar error meningkat, dan hasil estimasi cenderung bias. Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengidentifikasi keterkaitan (korelasi) antarvariabel independen, di mana data tidak memiliki hubungan sejajar pada variabel independen di dalam model regresi (Basuki, 2021). Data terbebas dari masalah

multikolinearitas jika memiliki nilai multikolinearitas $< 0,85$. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Uji Multikolinearitas.

	PAD	DAU	DAK	DBHP
PAD	1,000000	0,289776	0,272806	0,132747
DAU	0,289776	1,000000	0,691806	0,171252
DAK	0,272806	0,691806	1,000000	0,350313
DBHP	0,132747	0,171252	0,350313	1,000000

Sumber: Output Regresi Data Panel dengan *Eviews*.

Tidak terdapat multikolinearitas dalam model penelitian karena korelasi antara semua variabel dalam tabel 1 kurang dari 0,85.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Glejser adalah Jika nilai probability $> 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Jika nilai probability $< 0,05$ maka H_0 diterima, artinya ada masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas.

Variabel	Prob
BD	0,0865
PAD	0,4698
DAU	0,1242
DAK	0,1368
DBHP	0,6072

Sumber: Output Regresi Data Panel dengan *Eviews*.

Pada tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa nilai Prob variabel dependen $> 0,05$ atau $\alpha = 5\%$ atau 0,05, maka disimpulkan model tidak terjangkit heterokedastisitas.

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dengan Common/Pool Effect Model. Jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol (H_0), maka model Common Effect dianggap lebih tepat. Sebaliknya, jika hipotesis nol ditolak, model Fixed Effect Model lebih tepat, dan pengujian akan berlanjut ke uji Hausman. Tabel 3 dibawah ini menampilkan hasil uji Chow.

Tabel 3. Uji Chow.

Effects Test	Statistic	Prob
Cross-section F	15.379895	0.0000
Cross-section Chi-square	96.035384	0.0000

Sumber: Output Regresi Data Panel dengan *Eviews*.

Berdasarkan hasil Uji Chow yang telah dilakukan, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F/Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan Common Effect Model (CEM). Dengan demikian, analisis regresi data panel dilanjutkan menggunakan FEM dan perlu dilakukan pengujian lanjutan yaitu Uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara FEM dan REM.

Uji Hausman

Uji Hausman test bertujuan untuk menentukan model yang lebih tepat antara Fixed Effect dan Random Effect. Hipotesis dalam uji chow adalah: H_0 : Random Effect Model H_1 : Fixed Effect Model Jika probabilitas Chi-Square Statistic kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan model fixed effect yang terbaik untuk digunakan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Chi-Sq. Statistic lebih dari 0,05 maka H_0 diterima dan model random effect yang terbaik untuk digunakan. Hasil dari Uji hausman bisa dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Uji Hausman.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Prob.
<i>Cross-section random</i>	9.704667	0.0457

Sumber: Output Regresi Data Panel dengan *Eviews*.

Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai *cross-section random* mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0457 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian adalah Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan Random Effect Model (REM). Oleh karena itu, model FEM dipilih sebagai model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini karena dianggap mampu memberikan hasil estimasi yang lebih baik.

Persamaan Regresi Data Panel dengan FEM

Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBHP terhadap belanja daerah. Setelah dilakukan pemilihan metode estimasi melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, diperoleh bahwa model estimasi yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Berikut tabel 5 yang menampilkan hasil regresi data panel dengan menggunakan model Fixed Effects Model (FEM):

Tabel 5. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*.

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BD	2.598346	2.230417	1.164960	0.2485
PAD	0.004807	0.010751	0.447152	0.6563
DAU	0.575549	0.165556	3.476463	0.0009
DAK	0.246141	0.059887	4.110082	0.0001
DBHP	-0.007287	0.021306	-0.342032	0.7335

Sumber: Output Regresi Data Panel dengan *Eviews*.

Dari hasil regresi data panel dengan metode Fixed Effects Model (FEM) pada tabel 5 didapatkan persamaan regresi data panel untuk daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

$$\text{Log}(BD) = 2.598346 + 0.004807 \text{Log}(PAD) + 0.575549 \text{Log}(DAU) + 0.246141 \text{Log}(DAK) + -0.007287 \text{Log}(DBHP) + e \dots \dots \dots (ii)$$

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel metode Fixed Effects Model (FEM) pada Tabel 5 maka model regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta utama (C) sebesar 2,598346 memiliki arti Nilai konstanta dasar yang kecil ini mengindikasikan bahwa aktivitas belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi sangat bergantung pada realisasi dana transfer dan PAD. Tanpa adanya pendanaan tersebut, pemerintah daerah akan menghadapi keterbatasan fiskal untuk melaksanakan belanja daerah.
- b. Variabel PAD memiliki nilai koefisien sebesar 0,004807 dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah (nilai probabilitas 0,6563 > 0,05).
- c. Variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,575549 (nilai probabilitas 0,0009 < 0,05). Artinya, setiap peningkatan 1% Dana Alokasi Umum (DAU), maka akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 0,575549%, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
- d. Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,246141 (nilai probabilitas 0,0001 < 0,05). Artinya, setiap peningkatan 1% Dana Alokasi Khusus (DAK), maka akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 0,246141%, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
- e. Variabel memiliki nilai koefisien sebesar -0,007287 dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah (nilai probabilitas 0,7335 > 0,05).

Uji Hipotesis

Hasil Uji F

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F-hitung sebesar 44,20219 > F-tabel yaitu 2,498919 dan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha

diterima. Artinya PAD, DAU, DAK, dan DBHP secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hasil Uji t

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara persial pada tabel 5, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat dilihat bahwa:

- a. Hasil uji t pada variabel PAD diperoleh nilai t-hitung sebesar $0,447152 < t$ tabel yaitu $1,992102$ dan nilai signifikansi sebesar $0,6563 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
- b. Hasil uji t pada variabel DAU diperoleh nilai t-hitung sebesar $3,476463 > t$ tabel yaitu $1,992102$ dan nilai signifikansi sebesar $0,0009 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
- c. Hasil uji t pada variabel DAK diperoleh nilai t-hitung sebesar $4,110082 > t$ tabel yaitu $1,992102$ dan nilai signifikansi sebesar $0,0001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
- d. Hasil uji t pada variabel DBHP diperoleh nilai t-hitung sebesar $-0,342032 < t$ tabel yaitu $1,992102$ dan nilai signifikansi sebesar $0,7335 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya DBHP tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah.

Uji Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar $0,888372$ atau $88,84\%$. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PAD, DAU, DAK dan DBHP dalam menjelaskan Belanja Daerah setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel penelitian adalah sebesar $88,84\%$, sedangkan sisanya sebesar $11,16\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Analisis Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar $0,447152$ yang lebih kecil dari t-tabel $1,992102$ serta nilai signifikansi $0,6563$ yang lebih besar dari $0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap pembiayaan Belanja Daerah masih relatif rendah karena kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber PAD belum maksimal. Selain itu, sebagian besar PAD masih digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan operasional dibandingkan untuk mendukung

pembangunan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Friyani, 2017), (Susanti dkk., 2023), serta (Haykal dkk., 2024). Secara teoritis, PAD seharusnya memiliki peran penting dalam meningkatkan Belanja Daerah karena mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi perlu terus berinovasi dalam mengoptimalkan dan menggali sumber-sumber PAD baru agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

Analisis Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-hitung sebesar 3,476463 yang lebih besar dari t-tabel 1,992102 serta nilai signifikansi 0,0009 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Dayanti dkk., 2018), (Putri, 2024), dan (Haykal dkk., 2024). Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa peningkatan DAU akan mendorong kenaikan Belanja Daerah karena DAU merupakan transfer dana dari pemerintah pusat yang penggunaannya relatif fleksibel dan tidak terikat pada tujuan tertentu. Koefisien DAU yang bernilai positif sebesar 0,575549 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan DAU sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,575549%. Pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, DAU menjadi sumber pendanaan yang penting karena dapat digunakan lebih leluasa dibandingkan PAD maupun dana transfer lainnya.

Analisis Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 4,110082 yang lebih besar dari t-tabel 1,992102 serta nilai signifikansi 0,0001 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan DAK akan meningkatkan Belanja Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ikhwan dkk., 2019), (Putri, 2020), serta (Apriliani & Sudjana, 2023). Pengaruh besar DAK terjadi karena dana ini digunakan untuk membiayai program prioritas nasional, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan pelayanan publik, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Analisis Pengaruh DBHP terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan nilai t-hitung sebesar -0,342032 yang lebih kecil dari t-tabel 1,992102 dan nilai signifikansi 0,7335 yang lebih besar dari 0,05. Selain tidak signifikan, DBHP juga memiliki koefisien negatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sari, 2017), (Dayanti dkk., 2018), dan (Haykal dkk., 2024). Kondisi tersebut disebabkan oleh

kecilnya kontribusi DBHP dalam struktur APBD, sehingga tidak mampu memberikan pengaruh nyata terhadap Belanja Daerah. Selain itu, peningkatan belanja daerah lebih banyak didukung oleh SiLPA, serta dana transfer lain seperti DAU dan DAK yang memiliki porsi lebih besar dan lebih stabil. Keterlambatan penyaluran DBHP juga menyebabkan dana tersebut sering tidak terserap pada tahun berjalan dan menjadi SiLPA untuk tahun berikutnya.

Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBHP secara Bersama-sama terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F-hitung sebesar 44,20219 yang lebih besar dari F-tabel 2,498919 serta nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBHP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut merupakan sumber utama pendapatan daerah yang berperan dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dengan meningkatnya PAD, DAU, DAK, dan DBHP secara bersama-sama, kemampuan keuangan daerah akan meningkat sehingga mendorong peningkatan Belanja Daerah.

Analisis Fenomena Flypaper effect pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) tidak berpengaruh signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Koefisien DAU (0,575549) dan DAK (0,246141) yang lebih besar serta signifikan dibandingkan PAD (0,004807) mengindikasikan terjadinya fenomena flypaper effect. Dengan demikian, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat dalam membiayai Belanja Daerah, sementara kemampuan mengoptimalkan PAD masih relatif rendah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial PAD dan DBHP tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, PAD, DAU, DAK, dan DBHP berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu, penelitian ini

membuktikan terjadinya fenomena *flypaper effect*, yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU dan DAK yang lebih besar dan signifikan dibandingkan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat daripada pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi disarankan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi ekonomi daerah, peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah yang lebih efektif guna meningkatkan kemandirian fiskal. Selain itu, pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan pelayanan publik. Mengingat terjadinya fenomena *flypaper effect*, pemerintah daerah juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dengan memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan, sehingga pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat lebih didukung oleh pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliani, D., & Sudjana. (2023). Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2017-2021. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 39–50.
- Basuki, A. T. (2021). *Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dikengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*.
<https://ekonometrikblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/08/Draft-Buku-Analisis-Data-Panel-Dalam-Penelitian-Ekonomi-Dan-Bisnis-2021-Dikompresi.Pdf>
- Dayanti, Delis, & Emilia. (2018). *Flypaper effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 101–110. <https://doi.org/10.22437/Pdpd.V7i3.5578>
- Dewi Puspita, Merita Pahlevi, Yoga Madya Raharja, S. H., & Azhariantio Latief Baroto, Aditya Widya Permana, W. T. R. (2021). Desentralisasi Fiskal Dua Dekade Implementasi. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200_Buku_Dua_Dekade_De_sentralisasi_Fiskal.Pdf
- Friyani, R. (2017). *Flypaper effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dandana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Pendidikan, Ekonomi, Akutansi*, 5, 101–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/Je.V5i2.956>
- Haykal, M. (2024). Analisis *Flypaper effect* Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana

- Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(April), 33–46. <https://doi.org/10.29103/Jam.V%Vi%I.11555>
- Ikhwani, Naz’Aina, R. (2019). *Flypaper effect* Pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(2), 1–9.
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika. (2024). Mengelola Defisit Anggaran Provinsi Jambi: Tantangan Dan Solusi. [https://www.jambiprov.go.id/berita-mengelola-defisit-anggaran-provinsi-jambi-tantangan-dan-solusi.html#:~:Text=Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah,Masyarakat Jambi Yang Lebih Baik](https://www.jambiprov.go.id/berita-mengelola-defisit-anggaran-provinsi-jambi-tantangan-dan-solusi.html#:~:Text=Lain-Lain%20Pendapatan%20Asli%20Daerah,Masyarakat%20Jambi%20Yang%20Lebih%20Baik)
- Kesarditama, F. (2024). *Analisis Flypaper effect Pada Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi*. https://repository.unja.ac.id/60042/?utm_source=
- Keuangan,Kementerian.(2021).Danabagihasilpajak. <https://djp.kemkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/dana-transfer/dana-bagi-hasil.html>
- Prilia Magie Andrea Sembel, Vekie A. Rimate, D. C. R. (2018). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper effect* Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016. *Jurnal Pembangunan Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32714.19.1.2018>
- Prof. Dr. Ambya, S.E., M. S. (2023). Ekonomi Keuangan Daerah. [file:///C:/Users/HP/Appdata/Local/Packages/5319275A.Whatsappdesktop_Cv1g1gva_nyjgm/Localstate/Sessions/B3B42E55A6FCFBCC6CA957D0C65E3F1B8D36FA50/Transfers/2026-18/BUKU EKONOMI KEUANGAN DAERAH-1.Pdf](file:///C:/Users/HP/Appdata/Local/Packages/5319275A.Whatsappdesktop_Cv1g1gva_nyjgm/Localstate/Sessions/B3B42E55A6FCFBCC6CA957D0C65E3F1B8D36FA50/Transfers/2026-18/BUKU%20EKONOMI%20KEUANGAN%20DAERAH-1.Pdf)
- Putri, W. S. (2024). Pengaruh *Flypaper effect* Pad , Dau , Dan Dbh Terhadap Belanja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5810>
- Putri, Z. M. (2020). *Flypaper effect* Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2769/2778>
- Renata. (2024). Pengertian Belanja Daerah Dan Jenis-Jenis Belanja Daerah Secara Lengkap. <https://www.referensiswa.my.id/2021/05/pengertian-belanja-daerah-dan-jenis.html>
- Sari, A. (2017). Pengaruh Pad , Dau , Dak , Dan Dbh Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(22). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1179>
- Susanti, Wage, E. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia. 5. <https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8112>